

Kebijakan Standar Nasional Pendidikan pada Sekolah Dasar di Luwu Utara

Supian Sakti¹ Ashariana² Bachtiar³ Nuddin⁴

^{1,2,3,4} Universitas Pejuang Republik Indonesia (UPRI) Makassar, Indonesia

E-mail: supiansakti@gmail.com¹ asharianayahya@gmail.com²

bachtiarpasca536@gmail.com³ nuddi@gmail.com⁴

Abstrak

Penelitian ini menganalisis implementasi Kebijakan Standar Nasional Pendidikan di Sekolah Dasar Luwu Utara dengan pendekatan kualitatif naturalistik. Hasil menunjukkan penerapan standar nasional berpedoman pada standar isi pemerintah. Meskipun tenaga pendidik dan sarana prasarana cukup memadai, masalah utama terletak pada pembiayaan yang kurang memadai. Standar penilaian pendidikan seragam di semua sekolah, termasuk pada ujian akhir siswa.

Kata Kunci: Implementasi; Standar Nasional Pendidikan; Sekolah Dasar

Abstract

This research analyzes the implementation of the National Education Standards Policy at North Luwu Elementary School using a naturalistic qualitative approach. The results show that the implementation of national standards is guided by government content standards. Even though the teaching staff and infrastructure are adequate, the main problem lies in inadequate funding. Educational assessment standards are uniform in all schools, including in student final exams.

Keyword: Implementation; National Education Standards; Elementary school

PENDAHULUAN

Pendidikan Sekolah Dasar (SD) memiliki tujuan utama untuk mencerdaskan dan membentuk kehidupan bangsa yang bertaqwa, cinta dan bangga terhadap negara, terampil, kreatif, berbudi pekerti, dan santun. Pendidikan SD diarahkan kepada anak-anak berusia 7 hingga 13 tahun, sebagai dasar pendidikan yang disesuaikan dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan konteks sosial-budaya. Siswa di SD diharapkan mampu menguasai berbagai bidang studi dan mengembangkan keterampilan pemecahan masalah <https://www.pendidik.co.id>.

Meskipun pembelajaran utama berlangsung di sekolah, penting untuk diakui bahwa pembelajaran juga terjadi di luar lingkungan sekolah. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal merencanakan lingkungan pendidikan yang menyediakan berbagai peluang bagi peserta didik untuk melakukan kegiatan belajar. Kegiatan belajar ini menjadi kunci dalam mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik menuju pencapaian tujuan yang diinginkan.

Sayangnya, beberapa permasalahan pendidikan saat ini dapat diatribusikan pada lemahnya implementasi pengendalian mutu pengelolaan pendidikan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta. Oleh karena itu, penting untuk memastikan implementasi pengelolaan pendidikan yang bermutu pada semua tingkatan pendidikan mengikuti standar mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sebagaimana diatur dalam

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Implementasi standar mutu pendidikan pada setiap tingkatan pendidikan menjadi strategi efektif dalam mengendalikan proses dan mekanisme belajar yang efisien. Pada dasarnya, seluruh proses pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan individu, baik sebagai makhluk individual, etis, maupun sosial. Pertumbuhan dan perkembangan individu dalam lingkungan yang terus berubah dipengaruhi oleh kemampuan pendidik, kondisi anak didik, sarana pendidikan, pilihan komunikasi pendidikan, dan lingkungan sekitar yang memungkinkan terjadinya interaksi edukatif dalam konteks pendidikan.

Kemampuan pemerintah dalam mengendalikan mutu pendidikan menjadi elemen kunci dalam mengatur, mengelola, dan mengoptimalkan implementasi standar mutu pendidikan, terutama di lingkup pendidikan formal. Keberhasilan proses pendidikan di sekolah dapat diukur secara realistis melalui kualitas anak didik, baik yang masih dalam proses pembelajaran maupun yang telah menjadi lulusan. Prestasi belajar anak didik menjadi indikator keberhasilan yang signifikan.

LITERATURE REVIEW

Implementasi umumnya diartikan sebagai pelaksanaan atau realisasi kegiatan, yang seringkali didahului oleh suatu program atau konsep (Palfrey, 2002). Sebagai contoh, dalam konteks manajemen, implementasi merujuk pada pelaksanaan kegiatan dengan menerapkan konsep manajemen. Kemudian (Jackson, 2001), mengemukakan bahwa implementasi berarti melaksanakan kegiatan berdasarkan ide dan program yang telah disusun sebelumnya. Ini melibatkan penggunaan biaya, penggunaan anggaran, serta proses yang terkait dengan penggerakan dan pengarahan fungsi-fungsi yang telah disusun.

Secara keseluruhan, implementasi selalu dihubungkan dengan perencanaan dan penetapan program. Ini juga terkait dengan sasaran, tujuan, anggaran, dan sumber daya manusia pelaksana. Dalam pelaksanaan kegiatan, aspek pentingnya adalah mengarahkan sesuai prosedur, mengembangkan rasa tanggung jawab, dan melakukan pengendalian secara sistematis. Hal ini bertujuan agar semua berjalan sesuai rencana yang telah disusun (May, 2013). Sementara (Corchón, 2012) memandang bahwa implementasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan menyusul suatu keputusan, yang selalu bertujuan untuk mencapai sasaran tertentu. Diperlukan serangkaian aktivitas untuk merealisasikan pencapaian sasaran tersebut.

Kemudian kebijakan publik dipahami sebagai pedoman untuk bertindak yang menunjukkan cara alokasi sumber daya dan pelaksanaan tugas dalam organisasi (Luton, 2023). (Utting, 2023) menyatakan bahwa membuat kebijakan yang bagus di atas kertas lebih mudah dibandingkan merumuskannya dalam kata-kata yang mengenakan dan melaksanakannya dengan cara yang memuaskan semua pihak. Sementara (Dunn, 2017) kebijakan publik lebih menekankan konsep pemikiran pada pelaksanaan kebijakan dengan menggunakan instrumen-instrumen yang mapan dan didukung oleh sarana implementasi kebijakan yang memadai. Ia juga menyoroti makna moral dan etika dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan publik. Dewasa ini, istilah kebijaksanaan lebih sering digunakan dalam konteks tindakan pemerintah dan perilaku negara pada umumnya. Suatu kebijaksanaan pemerintah merupakan tindakan nyata dari suatu institusi pemerintah yang bertujuan mencapai tujuan negara atau daerah dalam suatu kegiatan tertentu.

Sehingga implementasi kebijakan publik merupakan suatu proses tindakan administratif yang dapat diselidiki pada tingkat program tertentu. Sementara itu, (Towalu, 2022) menyatakan bahwa implementasi melibatkan proses menuju tujuan kebijakan dengan

menggunakan pendekatan administratif dan politik. (Teodoro et al., 2020) memami bahwa konsep implementasi mencakup proses tindak lanjut untuk mewujudkan program atau kebijakan. Dalam proses ini, berbagai unsur dapat mendukung atau menghambat pencapaian sasaran program. Terdapat tiga unsur penting dalam implementasi, yaitu program atau kebijakan yang dilaksanakan, kelompok sasaran, dan unsur pelaksana.

METODOLOGI

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan fokus pada jenis penelitian deskriptif dalam upaya mendapatkan pemahaman yang mendalam, teknik pengumpulan data yang digunakan melibatkan wawancara mendalam, observasi, dan telaah pustaka (McNabb, 2020). Pemilihan pendekatan kualitatif ini diarahkan untuk merinci dan menggambarkan dengan cermat fenomena yang terkait dengan implementasi Kebijakan Standar Nasional Pendidikan di Sekolah Dasar Luwu Utara. Penelitian ini bertujuan untuk memahami konteks dan dinamika pelaksanaan kebijakan secara komprehensif.

Sumber data yang diharapkan dimanfaatkan dalam penelitian ini mencakup data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan melibatkan wawancara mendalam dan terbuka, observasi langsung, serta telaah dokumen. Obyek penelitian difokuskan pada implementasi kebijakan di Sekolah Dasar Luwu Utara. Penelitian ini memiliki karakteristik kualitatif, dengan pendekatan naturalistik yang memungkinkan peneliti menjadi instrumen utama dalam menggali pemahaman mendalam. Pengumpulan data dilaksanakan secara triangulasi, memastikan keakuratan dan kelengkapan informasi untuk memberikan gambaran deskriptif yang komprehensif mengenai fenomena yang sedang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Standardisasi Pendidikan pada Aspek Standar Isi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Utara pada 9 Desember 2022, bimbingan dan pengarahan terhadap standar dokumen kurikulum telah disampaikan kepada semua sekolah. Namun, kondisi variasi sekolah dasar di Kabupaten Luwu Utara menyebabkan dokumen kurikulum belum sepenuhnya dapat diimplementasikan secara penuh di masing-masing satuan pendidikan sekolah dasar.

Standardisasi Pendidikan pada Aspek Standar Proses

Dari hasil wawancara dengan pengawas pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Luwu Utara, terungkap bahwa penerapan standar proses pembelajaran masih menghadapi beberapa kesulitan. Faktor-faktor seperti sumber daya guru yang belum efektif menjalankan tugasnya dan keterbatasan prasarana pendukung menjadi kendala dalam mencapai harapan pemerintah terkait standar proses pendidikan di sekolah dasar.

Standardisasi Pendidikan pada Aspek Standar Kompetensi

Wawancara dengan pengawas pendidikan di Kabupaten Luwu Utara menunjukkan bahwa hampir seluruh tenaga pendidik dan kependidikan telah sesuai dengan standar kompetensi yang dimiliki. Meskipun demikian, masih ada beberapa guru yang mengajar lebih dari satu bidang studi, menciptakan kesulitan dalam menyesuaikan waktu dan volume pengajaran.

Standardisasi pada Aspek Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Hasil wawancara dengan Kabid Pendidikan Dasar pada 10 Desember 2022 mengindikasikan bahwa tenaga pendidik dan kependidikan di Luwu Utara telah ditempatkan sesuai dengan bidang tugasnya dan telah melalui proses pendidikan dan latihan dalam berbagai kompetensi pengajaran. Meskipun demikian, penyesuaian jumlah tenaga kependidikan dengan perkembangan kebutuhan sekolah masih diperlukan.

Implementasi Standar Pendidikan pada Aspek Standar Sarana dan Prasarana

Observasi peneliti menunjukkan bahwa gedung sekolah di Luwu Utara memenuhi rasio minimum luas lantai, tata bangunan, dan kriteria kesehatan dan keselamatan. Sarana prasarana yang tersedia mencakup ruang kelas, perpustakaan, ruang guru, dan fasilitas lainnya sesuai standar.

Implementasi Standar Pendidikan pada Aspek Standar Pengelolaan Pendidikan

Menurut wawancara dengan pengawas sekolah, seluruh standar pengelolaan pendidikan pada Sekolah Dasar di Luwu Utara telah memiliki instrumen, hanya perlu optimalisasi manajemen sekolah secara simultan untuk mencapai kuantitas lulusan yang memadai.

Implementasi Standar Pendidikan pada Aspek Standar Pembiayaan

Dari wawancara dengan pengawas pendidikan, terlihat bahwa peningkatan mutu pengelolaan pendidikan dihadapkan pada kesulitan pembiayaan. Ketergantungan pada pemerintah dan partisipasi masyarakat melalui komite sekolah menjadi faktor utama dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan sekolah.

Implementasi Standar pada Aspek Standar Penilaian Pendidikan

Wawancara dengan tenaga pengawas pendidikan menunjukkan bahwa hampir seluruh sistem penilaian hasil belajar siswa dikondisikan untuk sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan nasional. Pedoman dan pelatihan telah diberikan kepada seluruh SD untuk memastikan bahwa penilaian dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku.

Dengan demikian secara keseluruhan dapat dipahami bahwa implementasi standar nasional pendidikan di Sekolah Dasar di Kabupaten Luwu Utara, antara lain:

1. Standar isi pengelolaan pendidikan di Sekolah Dasar di Luwu Utara, telah berpedoman pada standar isi yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
2. Dari segi standar proses, maka seluruh rambu-rambu dan instrumen yang disyaratkan dalam standar nasional pendidikan telah disediakan, bahkan ada beberapa sekolah secara sangat baik menjalankannya.
3. Dari segi Standar kompetensi lulusan yang ada, maka tingkat kelulusan siswa telah mencapai rata-rata kelulusan yang memenuhi harapan secara nasional pada setiap pelaksanaan UAS dalam lima tahun terakhir. Artinya bahwa sekolah SD di Luwu Utara, telah mampu meluluskan siswanya sesuai standar yang ada, bahkan lulusan tersebut semuanya dapat diterima disekolah SMP.
4. Dari segi Standar pendidik dan tenaga kependidikan, maka hampir seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan telah sesuai dengan bidang kompoetensinya ,hanya jumlahnya yang belum terpenuhi,sehingga ada beberapa guru harus mengajar lebih dari mata pelajaran.Sedangkan tenaga kependidikan seluruhnya ditempatkan pada bidang yang relevan.
5. Standar sarana dan prasarana yang ada, dari observasi yang dilakukan umumnya cukup memadai, bahkan seluruh sekolah telah dilengkapi sarana laboratorium dan perpustakaan. Hal ini berkaitan dengan kedudukan sekolah ini, yang mendapat dukungan penuh dar ipemerintah.
6. Dari segi standar pengelolaan yang ada, seluruh proses pengelolaan tersebut mendapat pengawasan dan pengendalian, sehingga mekanisme pengeloaan yang ada selalu disesuaikan dengan standar yang tersedia.
7. Masalah utama dalam pengelolaan pendidikan di SD, adalah standar pembiayaan yang belum dapat dipenuhi dengan memadai, hanya saja bahwa standar proses pembiayaan, seperti rencana anggaran (RAB), telah cukup memadai disusun oleh masing - masing sekolah, sehingga seluruh mekanisme pembiayaan dapat tergambar.
8. Standar penilaian pendidikan yang ada ditetapkan secara seragam pada masing sekolah ,sehingga metode penilaian adalah sama dan tentu disesuaikan dengan

standar yang ditetapkan. Apalagi pada penilaian ujian akhir siswa.

KESIMPULAN

Implementasi standar nasional pendidikan di Sekolah Dasar Kabupaten Luwu Utara, dapat disimpulkan bahwa sejumlah aspek telah berjalan sesuai standar yang ditetapkan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan, seperti variasi kondisi sekolah yang menghambat implementasi dokumen kurikulum secara menyeluruh, serta kendala dalam standar proses pembelajaran terkait efektivitas sumber daya guru dan keterbatasan prasarana. Meskipun tenaga pendidik dan kependidikan umumnya sesuai dengan standar kompetensi, perlu perhatian khusus terkait alokasi tugas agar semua guru dapat optimal dalam mencapai tujuan pengajaran. Sarana prasarana di sekolah-sekolah umumnya memadai, tetapi masalah pembiayaan menjadi hambatan utama yang memerlukan dukungan pemerintah dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, perlu langkah strategis dan sinergi stakeholders untuk terus meningkatkan kualitas implementasi standar pendidikan di wilayah tersebut.

REFERENSI

- Corchón, L. C. (2012). Implementation theory. In *Computational Complexity: Theory, Techniques, and Applications*. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-1800-9_102
- Dunn, W. N. (2017). Public policy analysis: An integrated approach, sixth edition. In *Public Policy Analysis: An Integrated Approach, Sixth Edition*. <https://doi.org/10.4324/9781315181226>
- Jackson, M. O. (2001). A crash course in implementation theory. *Social Choice and Welfare*. <https://doi.org/10.1007/s003550100152>
- Luton, L. S. (2023). Public Policy Theory. In *The Politics of Garbage*. <https://doi.org/10.2307/jj.6253297.6>
- May, C. (2013). Towards a general theory of implementation. *Implementation Science*. <https://doi.org/10.1186/1748-5908-8-18>
- McNabb, D. E. (2020). Descriptive Research. In *Research Methods for Political Science*. <https://doi.org/10.4324/9781003103141-12>
- Palfrey, T. R. (2002). Chapter 61 Implementation theory. In *Handbook of Game Theory with Economic Applications*. [https://doi.org/10.1016/S1574-0005\(02\)03024-2](https://doi.org/10.1016/S1574-0005(02)03024-2)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan. (2022). *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022*, 1-16. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/196151/pp-no-4-tahun-2022>
- Teodoro, M. P., Zhang, Y., & Switzer, D. (2020). Political Decoupling: Private Implementation of Public Policy. *Policy Studies Journal*. <https://doi.org/10.1111/psj.12287>
- Towalu, H. (2022). Implementation of Public Policy. *Journal Research of Social Science, Economics, and Management*. <https://doi.org/10.59141/jrssem.v2i1.246>
- Utting, P. (2023). Public policy. In *Encyclopedia of the Social and Solidarity Economy: A Collective Work of the United Nations Inter-Agency Task Force on SSE (UNTFSSSE)*. <https://doi.org/10.4337/9781803920924.00066>
<https://www.pendidik.co.id>.